JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS
Jurnal Program Studi Akuntansi

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis>

**E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap
Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi
Sumatera Utara**

***E-Procurement as an Effort to Prevent Fraud Against Procurement of
Goods and Services in The Procurement Service Unit of North
Sumatera Province***

Irine Ika Wardhani¹, Arifa Pratami² & Ikbar Pratama^{3*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Potensi Utama, Indonesia

²Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 28 Mei 2021 Direview: 28 Mei 2021 Disetujui: 05 September 2021

*Corresponding email: ikbarpratama@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *E-procurement*, sistem pengendalian internal dan religiusitas terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh secara keseluruhan dari penyebaran kuisioner penelitian berjumlah 124 pada seluruh pegawai yang bekerja di ULP Provinsi Sumatera Utara. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian membuktikan bahwa *variable* e-procurement terbukti memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. *Variable* religiusitas terbukti memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. *Variable* sistem pengendalian internal terbukti memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Kata Kunci: Pencegahan Fraud; E-procurement; Religiusitas

Abstract

This study aims to analyze the influence of E-procurement, internal control system and religiosity on the prevention of fraud procurement of goods and services in the Procurement Service Unit (ULP) of Goods and Services of North Sumatra Province. This study uses quantifiable method with primary data source obtained in its entirety from the spread of 124 research questionnaires on all employees working in ULP North Sumatra Province. Data analysis in this study using Structural Equation Modelling (SEM) analysis using Partial Least Square (PLS). The results prove that variable e-procurement is proven to have a positive impact on the prevention of fraud procurement of goods and services. Variable religiosity is proven to have a positive impact on the prevention of fraud procurement of goods and services. Variable internal control system is proven to have a positive impact on the prevention of fraud procurement of goods and services.

Keywords: Fraud Prevention, E-Procurement; Religiosity

How to Cite: Wardhani, I. I. Pratami, A., & Pratama, I., (2021). E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*. 7 (2): 126-139

PENDAHULUAN

Di era otonomi daerah, pengadaan barang dan jasa semakin tinggi. Hal ini dikarenakan pembangunan yang dilakukan daerah tidak terlepas dari kemampuan daerah untuk merencanakan dan menyediakan barang dan juga jasa. Tingginya kebutuhan daerah dalam penyediaan kebutuhan bagi masyarakat membuat beberapa oknum memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana dinyatakan oleh Farida (2013) bahwa sistem yang beraku di Indonesia saat ini dalam hal penyediaan jasa dan barang masih menjadi ladang subur bagi praktik korupsi. Pendapat ini juga diperkuat oleh pendapat Ghani (2017) yang menyebutkan, bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan penyumbang korupsi terbesar, hampir 80% persoalan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersumber dari penyediaan barang dan juga jasa.

Kasus korupsi berupa kecurangan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara pada umumnya dalam penyediaan barang dan juga jasa, yang disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Setyadiharja (2018) sedikitnya ada 10 faktor yang menyebabkan penyediaan barang dan juga jasa di lingkungan pemerintah rawan kecurangan antara lain : 1) Tender arisan dan adanya *kickback* pada proses tender. 2) Suap untuk memenangkan tender. 3) Proses tender yang tidak transparan. 4) *Supplier* bermain mematok harga tertinggi. 5) Memenangkan perusahaan saudara. 6) Pencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu. 7) Adanya almamater sentris, 8) Pengusaha tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan memenangkan tender, 9) Tender tidak diumumkan, 10) Tidak membuka akses bagi peserta dari daerah.

Dari 10 penyebab terjadinya tindakan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di atas maka setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti proses tender yang tidak transparan adanya memenangkan perusahaan saudara (oknum pegawai). Sedangkan untuk faktor eksternal, seperti pemasok menawar dengan harga tertinggi, dan pengusaha yang tidak memiliki hak pengelolaan penuh, mereka dapat mengikuti tender atau bahkan memenangkan tender. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam proses pembelian barang dan jasa akan dimulai pada tahun 2012 pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mengeluarkan surat edaran No 17/KA/02/2012 tentang kewajiban penyediaan barang maupun jasa secara elektronik. (Setyadiharja, 2018). Tujuan dari penyediaan barang maupun jasa secara online adalah untuk mengurangi pertemuan antara penyelenggara lelang barang maupun jasa dengan peserta. Menggunakan sistem pengadaan secara *online* atau *E-procurement* maka proses penyediaan barang maupun jasa dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel (Setyadiharja, 2018). Lebih lanjut Urumsah, Valoni, dan Asmu'i (2017) menyatakan jika pelaksanaan *E-procurement* pada dasarnya dilaksanakan sebagai satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan, termasuk didalamnya pada organisasi publik.

Provinsi Sumatera Utara salah satu daerah yang telah menerapkan sistem *E-procurement* dalam implementasi penyediaan barang maupun jasa, dalam upaya melaksanakan *E-procurement* maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah membentuk suatu Unit Layanan Pengadaan (ULP). Adanya ULP ini semua penyediaan barang maupun jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan dikonsentrasikan pada satu unit pelayanan sehingga akan memberikan keefektifan dari segi biaya dan waktu, lebih akuntabel dalam pelaksanaan pengadaannya serta

pertanggungjawabannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 pasal 130. Pemanfaatan teknologi dalam penyediaan barang maupun jasa dalam bentuk *E-procurement* ini diharapkan pemerintah kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dapat memperbaiki sistem penyediaan barang maupun jasa melalui pelaksanaan *E-procurement* diharapkan mampu menutup terjadinya tindak kecurangan dalam proses penyediaan barang maupun jasa. Menurut Adi, Ardiyani dan Ardianingsih (2016) kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal organisasi, yang bertujuan untuk meraih keuntungan dan dapat menimbulkan kerugian pihak lain. Tuanakotta (2013) menyatakan jika kecurangan merupakan kejahatan yang dapat diatasi dengan dua cara, yaitu mencegah dan mendeteksi. Jadi pencegahan terhadap kecurangan merupakan diantara cara dalam menangani kecurangan.

Pada dasarnya penerapan *E-procurement* dapat mencegah timbulnya kecurangan. Hal ini disebabkan Sistem *E-procurement* dapat mengurangi intensitas pertemuan antara panitia pengadaan dengan penyedia jasa atau peserta, sehingga dapat menghindari praktek-praktek kotor yang seringkali mempengaruhi proses pembelian barang dan jasa Nedialita (2014). Selain dapat mencegah kecurangan, penerapan *E-procurement* menurut Urumsah et al (2017) juga akan diperoleh 6 keuntungan yaitu : 1) meningkatkan komunikasi, 2) mempererat hubungan dengan pihak *supplier*, 3) mengurangi biaya transaksi, 4) mengurangi waktu, 5) menyediakan laporan evaluasi dan 6) meningkatkan kepuasan pengguna. Penelitian yang telah dihasilkan oleh Isnaini et al., (2020); James dan Omulo (2018); Marbun et al., (2020); Nu'man et al., (2020); Nugroho et al., (2015); Nugroho et al., (2020); Saragih et al., (2020); Utami et al., (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *E-procurement* memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap *fraud* dalam pengadaan barang/jasa. Jadi semakin baik dalam penerapan *E-procurement* semakin tinggi pula pencegahan terhadap *fraud*.

Kecurangan dalam proses penyediaan barang maupun jasa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pengendalian internal. Pengendalian internal menurut Hermiyetti (2010) adalah suatu tahapan yang dilakukan oleh dewan komisaris melaksanakan proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bagi realisasi pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan tujuan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan kontrol internal yang tepat dapat mencegah kecurangan. Hal ini sesuai yang telah diteliti oleh oleh Agyemang (2016); Danilwan et al., (2020); Oduro & Cromwell (2018), Njenga & Osiemo (2013), Mufidah (2017), Hermiyetti (2010) Joseph et al., (2015); Pratama et al., (2019); Rozmita et al., (2015); Saragaih et al., (2020); Sujianto et al., (2020) membuktikan jika pengendalian internal berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan dalam penyediaan barang dan maupun jasa.

Faktor selanjutnya yang dapat mencegah tindakan kecurangan adalah religiusitas. Secara khusus, Ahyadi (2015) menjelaskan bahwa religiusitas adalah bagaimana seorang individu memahami, menginternalkan dan mengintegrasikan norma-norma agama ke kehidupan individu sehari-hari dan menjadi kepribadian mereka. Penelitian yang telah dihasilkan oleh Atrizka et al., (2020); Basri (2015) Purnamasari dan Amaliah, (2015) Wicaksono dan Urumsah (2016) membuktikan jika religiusitas mampu mencegah kecurangan yang kan terjadi.

Pengaruh E-procurement terhadap pencegahan *fraud*

Croom dan Jones (2007) menjelaskan, *E-procurement* mengacu pada penggunaan kombinasi sistem teknologi informasi untuk fungsi pengadaan, termasuk pencarian

sumber daya, negosiasi, pemesanan dan pembelian. Penerapan *E-procurement* pada dasarnya diimplementasikan dalam rangka mencegah timbulnya *fraud*. Hal ini disebabkan sistem *E-procurement* dapat mengurangi intensitas pertemuan antara panitia pengadaan dengan penyedia jasa atau peserta, sehingga dapat menghindari atau menghindari praktik-praktik kotor yang kerap mewarnai proses pembelian barang dan jasa. Nedialita (2014). Selain dapat mencegah kecurangan, penerapan *E-procurement* menurut Urumsah et al., (2017) juga akan diperoleh 6 keuntungan yaitu 1) meningkatkan komunikasi, 2) mempererat hubungan dengan pihak *supplier*, 3) mengurangi biaya transaksi, 4) mengurangi waktu, 5) menyediakan laporan evaluasi dan 6) meningkatkan kepuasan pengguna.

E-procurement adalah sistem yang dapat menyederhanakan proses pengadaan. Di era digital, pemerintah menggunakan internet untuk memberikan layanan dan untuk berkomunikasi dengan warga dan organisasi. Penerapan pengadaan *E-procurement* menjadi lebih ringkas dan mudah dapat mengurangi korupsi (Rotchanakitumnuai, 2013). Pengadaan lelang elektronik memiliki peran utama dalam mengurangi kolusi dalam pengadaan dengan memperluas partisipasi dan memperluas pemasok atau perusahaan yang tertarik untuk bergabung dengan pengadaan (Rotchanakitumnuai, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh James & Omulo (2018) Nugroho et al., (2015) menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *E-procurement* memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap *fraud* dalam pengadaan barang maupun jasa. Jadi semakin baik dalam penerapan *E-procurement* semakin tinggi pula pencegahan terhadap *fraud*. Maka, dari uraian di atas maka hipotesis yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1: *E-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

Pengaruh Religiusitas dengan Pencegahan *Fraud*

Ahyadi (2015) menjelaskan bahwa religiusitas adalah bagaimana seseorang individu memahami, menginternalkan dan mengintegrasikan norma-norma agama menjadi perilaku dan menjadi kepribadian mereka. Religiusitas atau agama mampu menjadi tameng untuk melindungi perilaku seseorang dalam melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakininya. Orang dengan sikap religius yang tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari kecurangan. Keimanan yang kokoh diharapkan dapat mencegah perilaku untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang diyakininya, akan terasa bersalah ketika melakukan kecurangan (Basri, 2015).

Pemahaman yang baik tentang religiusitas seseorang akan diimplementasikan dan tercermin dalam perilaku dan sikap dalam berbagai kegiatan termasuk dalam bekerja. Keyakinan bahwa Tuhan ada menyebabkan seseorang akan secara konsisten dengan aturan manusia dan aturan Tuhan termasuk untuk melakukan kecurangan. Karena itu, pemahaman yang tinggi tentang religiusitas akan menyebabkan rendahnya tindakan untuk melakukan kecurangan, karena merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama. Hasil penelitian yang ditulis oleh Purnamasari dan Amaliah, (2015) Wicaksono dan Urumsah (2016) dan Basri (2015) membuktikan jika religiusitas mampu membentengi diri untuk tidak melakukan tindakan kecurangan. Maka dari uraian ini hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Religiusitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*.

Hermiyetti (2010) menyatakan bahwa pengendalian internal adalah proses yang dilakukan oleh dewan komisaris yang bertujuan untuk memberikan jaminan yang cukup bagi terwujudnya tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kontrol internal yang tepat dapat mencegah tindakan penipuan. Jadi sistem pengendalian yang efektif pada akhirnya dapat menutup seseorang akan melakukan kecurangan dalam hal ini adalah kecurangan dalam penyediaan barang dan maupun jasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Oduro & Cromwell (2018), Njenga & Osiemo (2013), Agyemang (2016), Mufidah (2017), Hermiyetti (2010) Joseph et al., (2015), Rozmita et al., (2015) membuktikan jika pengendalian internal berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan dalam penyediaan barang dan maupun jasa. Berdasarkan uraian ini maka hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

H3: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

METODE PENELITIAN

Data Collection and Methods

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner menurut Sukmadinata (2008) adalah suatu teknik atau cara dalam mengumpulkan data penelitian secara tidak langsung, karena peneliti tidak bertanya dan responden kemudian menjawab. Kuesioner dalam penelitian ini berbentuk kuesioner tertutup. Seluruh pertanyaan penelitian menggunakan *Likert Scale*. Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Agak Tidak Setuju (3), Agak Setuju (4), Setuju (5) dan Sangat Setuju (6). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara keseluruhan dari penyebaran kuisisioner penelitian berjumlah 124 pada seluruh pegawai yang bekerja di ULP Provinsi Sumatera Utara.

Variables Definition and Measurements

Pencegahan *fraud* merupakan merupakan suatu perbuatan untuk mencegah timbulnya kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh orang internal ataupun luar organisasi dan dapat menimbulkan kerugian pihak lain. Pencegahan *fraud* pada penelitian ini diukur dengan indikator-indikator yang ditawarkan oleh Albrecht dan Albrecht (2009).

E-procurement mengacu pada penggunaan sistem teknologi informasi terintegrasi untuk fungsi pengadaan, termasuk pencarian sumber daya, negosiasi, pemesanan dan pembelian. *E-Procurement* dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Nugroho et al., (2015). Religiusitas adalah bagaimana seorang individu memahami, menginternalkan dan mengintegrasikan norma-norma agama menjadi perilaku dan kepribadian mereka. Religiusitas pada penelitian ini diukur dengan indikator yang ditawarkan oleh (Robbins, Glock, & Stark, 1994).

Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan oleh direksi yang bertujuan untuk memberikan kepastian yang cukup bagi terwujudnya tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini

pengendalian internal merujuk pada indikator-indikator yang ditawarkan oleh (Oduro & Cromwell, 2018).

Modelling and Methodological Framework

Untuk menganalisis data penelitian ini akan menggunakan analisis SEM (*Structural Equation Modelling*) dengan menggunakan (PLS) *Partial Least Square* (PLS) sebagai alat menganalisis. PLS merupakan diantara metode yang digunakan untuk melaksanakan SEM (model *Structural Equation Modelling*). Untuk tujuan penelitian ini metode ini dirasa lebih baik dibandingkan software SEM yang lain, misalnya AMOS dan LISREL. Model PLS ini akan digunakan jika landasan teori perancangan model lemah dan indikator pengukuran tidak sesuai dengan model pengukuran ideal. PLS dapat digunakan untuk sejumlah kecil sampel dan dapat diterapkan pada semua skala data (Ghozali dan Latan, 2012).

Tabel 1 Kriteria Penilaian PLS

Kriteria	Penjelasan
Evaluasi model Pengukuran	Nilai <i>loading faktor</i> diatas 0,6 <i>Composite reliability</i> > 0,60. <i>AVE</i> > 0,50 <i>Cronbachs Alpha</i> > 0,70
Evaluasi model Struktural	$P_{value} < 0,05$. f^2 dan q^2 0,02 <i>small Effect</i> 0,15 <i>medium Effect</i> 0,35 <i>large Effect</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Descriptive Statistics

Analisis deskriptif pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendeskripsikan data setiap variabel seperti rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi serta penyajian data melalui tabel frekuensi.

Tabel 2 Deskripsi Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pencegahan <i>Fraud</i>	124	3.00	5.50	4.42	0.55
<i>E-Procurement</i>	124	3.00	6.00	4.41	0.54
SPI	124	2.20	6.00	4.49	0.69
Relegiusitas	124	3.00	5.80	4.43	0.62

Sumber: Data Primer (2020)

Dari tabel 2 dapat diketahui jika variabel pencegahan *Fraud* memiliki rata-rata 4,42 yang termasuk ke dalam kategori baik. Variabel *E-procurement* 4,41 yang termasuk ke dalam kategori baik. Demikian halnya dengan variabel relegiusitas yang secara rata-rata dalam kategori baik.

Uji Indikator

Disebut juga *outer model* adalah menguji hubungan antara indikator terhadap variabel konstruksya. Dari uji indikator ini diperoleh *output* validitas dan realibilitas model yang diukur dengan kriteria *Convergent Validity*, *Discriminant Validity*, dan *Composite Reliability*. Hasil *convergent validity* seperti yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Item Loading dan Average Variance Expected (AVE)

Variabel	Item pernyataan	Kode	Loading	AVE
Pencegahan Fraud	Menolak penggunaan dokumen fotokopian	PF1	0,966	0,886
	Terdapat pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas	PF2	0,849	
	Menghindari praktik-praktik yang tidak lazim/mencurigakan	PF3	0,948	
	Ada larangan gaya hidup mewah	PF4	0,948	
	Ada rasa bersalah dan ketakutan	PF5	0,966	
	Menyediakan sarana pengaduan	PF6	0,962	
E-procurement	Implementasi E-procurement dapat mengurangi biaya	EE1	0,806	0,697
	Implementasi E-procurement menyebabkan perubahan perilaku	EE2	0,836	
	Implementasi E-procurement terjadi pergeseran hubungan, peningkatan pertukaran informasi antara panitia pengadaan dengan calon penyedia	EE3	0,857	
	Implementasi E-procurement memudahkan dalam perencanaan dan pengendalian	EE4	0,895	
	Implementasi E-procurement dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya	EE5	0,773	
Sistem Pengendalian Internal	Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian	SPI1	0,884	0,806
	Membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola	SPI2	0,907	
	Kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan	SPI3	0,916	
	Penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan perbaikan	SPI4	0,876	
	Model penyampaian informasi kepada semua yang bertanggungjawab	SPI5	0,904	
Religiusitas	Tingkat kepercayaan individu terhadap nilai-nilai agama	RG1	0,875	0,772
	Tingkat kepatuhan individu dalam melakukan ritual kegiatan seperti yang diperintahkan	RG2	0,881	
	Tingkat perasaan dan pengalaman religius individu	RG3	0,817	
	Tingkat pengetahuan dan pemahaman individu nilai agama mereka	RG4	0,784	
	Tingkat perilaku individu yang dimotivasi oleh mereka agama	RG5	0,885	

Hasil uji indikator pada Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa semua indikator variabel memiliki nilai *loading* yang lebih besar dari 0,60. Hasil *Average Variance Expected (AVE)* semua variabel juga memiliki yang lebih besar dari 0,50, dengan demikian semua indikator penelitian dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk digunakan dalam melakukan analisis data.

Uji Hipotesis (Inner Model)

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan Smart PLS.2 diperoleh hasil sebagaimana pada Gambar 1 diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 1 Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4 Koefisien Parameter, R Square, dan T-Statistik

Hipotesis	Hubungan	β (Beta)	R Square	T Statistics	Kesimpulan	Keterangan
H1	EE -> PF	0,217	0,957	3,567	Signifikan	Sesuai Hipotesis
H2	RG -> PF	0,158		2,213	Signifikan	Sesuai Hipotesis
H3	SPI -> PF	0,148		2,072	Signifikan	Sesuai Hipotesis

Sumber: Data primer diolah, 2020

Goodness of fit model diukur menggunakan R-square variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi. Korelasi prediksi Q-square model struktural adalah ukuran nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan derajat estimasi parameter. Nilai R-square > 0 artinya jika nilai R-square sama dengan 0, model memiliki korelasi prediktif yang berlawanan. 0 berarti bahwa model tidak memiliki korelasi prediktif. Nilai R-square 0.957 dapat diartikan bahwa variabel independen (PF, SPI, dan RG) dapat menjelaskan Y (PF) sebesar 95,7%.

Tabel 4 menunjukkan bahwa *E-procurement* memiliki t statistik $3,567 > 1,96$, dengan demikian variabel *E-procurement* terbukti secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pencegahan *fraud*, dengan demikian semakin baik penerapan *E-procurement* maka akan semakin baik pula pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai ULP Sumatera Utara. Sistem Pengendalian Internal memiliki t statistik $2,072 > 1,96$, dengan demikian variabel Sistem Pengendalian Internal terbukti secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pencegahan *fraud*. Relegiusitas memiliki t statistik $2,213 > 1,96$, dengan demikian variabel relegiusitas terbukti secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh E-procurement terhadap Pencegahan Fraud

Croom dan Jones (2007) menjelaskan, *E-procurement* mengacu pada penggunaan kombinasi sistem teknologi informasi untuk fungsi pengadaan, termasuk pencarian sumber daya, negosiasi, pemesanan dan pembelian. Penerapan *E-procurement* pada dasarnya diimplementasikan dalam rangka mencegah timbulnya *fraud*. Hal ini disebabkan sistem pengadaan secara elektronik dapat mengurangi intensitas pertemuan antara panitia pengadaan dengan penyedia jasa atau peserta, sehingga dapat

mencegah atau menghindari praktek-praktek kotor yang kerap mewarnai proses pengadaan barang dan jasa. Nedialita (2014).

Konsep *fraud triangle theory* kecurangan dalam penyediaan barang maupun jasa disebabkan karena adanya peluang (*opportunity*). Berkaitan dengan *E-procurement* maka dapat meminimalisir peluang (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan. Hal ini karena penipuan tidak hanya terjadi dalam situasi tekanan, tetapi juga ketika penipu menemukan peluang untuk melakukan penipuan. Terdapat beberapa faktor utama yang dapat meningkatkan peluang untuk mendorong seseorang melakukan kecurangan, yaitu 1) kurangnya tindakan pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi perilaku abnormal dan 2) ketidakmampuan menilai kualitas kinerja dengan baik. 3) Kegagalan menghukum pelaku penipuan. 4) Kurangnya informasi. 5) Ketidak perdulian, dan ketidak mampuan. 6) Kurangnya jejak audit (Iqbal dan Murtanto, 2016). Pada dasarnya, sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Sumatera Utara telah berperan positif dalam mencegah terjadinya *fraud*.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan *E-procurement* untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Sumatera Utara terbukti berdampak signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Pemanfaatan *E-procurement* dalam proses penyediaan barang maupun jasa dapat mencegah *fraud* karena dalam prosesnya intensitas pertemuan antara panitia penyediaan barang maupun jasa dengan calon vendor sangat minim sehingga peluang panitia penyediaan barang maupun jasa untuk melakukan kecurangan dapat dihindari (Nedialita, 2014). Calon vendor dan panitia dalam selama proses tidak saling bertemu atau berkomunikasi sehingga peluang untuk melakukan "suap", oleh calon vendor yang sering terjadi dalam proses penyediaan barang maupun jasa secara manual, dengan demikian sistem *E-procurement* dalam penyediaan barang maupun jasa menyebabkan proses dapat berjalan transparan dan dapat menghilangkan potensi adanya kecurangan.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2015) menunjukkan bahwa sistem *E-procurement* memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki arah positif terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi semakin baik dalam penerapan *E-procurement* semakin tinggi pula pencegahan terhadap *fraud*.

Pada kenyataannya meskipun keberadaan sistem *E-procurement* dapat dilakukan dalam proses pembelian barang dan jasa dapat membantu mencegah terjadinya *fraud*, namun jika tidak dimanfaatkan dengan efektif dan efisien *E-procurement* tidak akan berfungsi dengan baik. Pemerintah dalam hal ini harus menyelaraskan semua instansi untuk menerapkan sistem *E-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Undang-Undang yang telah disahkan mengenai proses penyediaan barang maupun jasa secara *online*. ULP Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan pelatihan bagi seluruh pegawai untuk mengenalkan proses pelaksanaan *E-procurement* agar sumber daya dapat menunjang sistem.

Pengaruh Religiusitas dengan Pencegahan Fraud

Hasil penelitian membuktikan jika ada pengaruh yang signifikan antara religiusitas dengan pencegahan *fraud*. Purnamasari dan Amaliah (2015) menjelaskan bahwa religiusitas adalah bagaimana seorang individu memahami, menginternalkan dan mengintegrasikan norma-norma agama kedalam perilaku dan menjadi kepribadian mereka. Sementara itu menurut Pamungkas (2014) religiusitas merupakan kepercayaan, gaya hidup, aktivitas ritual dan lembaga penyedia yang komprehensif makna dalam kehidupan manusia dan mengarahkan manusia pada nilai-nilai suci.

Adapun Pamungkas (2014) agama sebagai komitmen, beragama dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan.

Setiap ULP di Sumatera Utara memiliki cara masing-masing untuk meningkatkan religiusitas para pegawai mereka (Adhim, 2009). Pengamalan terhadap kepercayaan yang dianut oleh setiap pegawai harus diwujudkan secara nyata dalam melaksanakan pekerjaan. Bagi karyawan yang bergama Islam ada kajian khusus yang dilaksanakan secara rutin. Kajian ini dimaksudkan agar mereka dapat meresapi ajaran agama mengenai kejujuran dalam bekerja dan takut jika melakukan kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Ahyadi (2015) menjelaskan bahwa religiusitas adalah bagaimana seorang individu memahami, menginternalkan dan mengintegrasikan norma-norma agama kedalam perilaku dan menjadi kepribadian mereka. Religiusitas atau agama diyakini mampu mengendalikan tingkah laku seseorang sehingga bertentangan dengan nilai-nilai yang dianutnya. Orang dengan sikap religius yang tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari kecurangan. Keyakinan agama yang kuat diharapkan dapat mencegah orang mengambil kesalahan dan bertindak bertentangan dengan apa yang mereka pikirkan, terutama dalam penipuan. Keyakinan agama yang kuat diharapkan dapat mencegah orang melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang dipikirkannya melalui rasa bersalah, terutama dalam penipuan (Basri, 2015).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dan Amaliah (2015), Wicaksono dan Urumsah (2016), dan Basri (2015) membuktikan jika religiusitas dapat mencegah terjadinya kecurangan, dengan demikian keteguhan pegawai ULP Provinsi Sumatera Utara dengan agama yang dianutnya dapat meningkatkan kemauan mereka untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam penyediaan barang maupun jasa.

Religiusitas berkaitan dengan karakteristik setiap individu dan tidak dapat dilihat dengan mata. Religiusitas pegawai bukan hanya pelaksanaan kewajiban seseorang dalam melaksanakan perintah agamanya masing-masing. Perintah dari agama bukan hanya bersifat ritualistik namun juga dalam bentuk perbuatan. Seseorang mungkin dapat dinyatakan orang yang religius karena selalau melaksanakan shalat bagi yang muslim, datang ke gereja setiap hari minggu bagi yang nasrani. Akan tetapi ketika melaksanakan pekerjaan nilai religiusitas tersebut tidak diwujudkan salah satunya adalah dengan melakukan kecurangan (Hariyanto, Rini, & Margianawati, 2018). Padahal agama manapun tidak ada yang memerintahkan umatnya untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

Jadi untuk mengimplentasikan religiusitas seseorang menjadi tindakan dalam melaksanakan pekerjaan maka diperlukan penanaman nilai-nilai religiusitas dalam bekerja (Rifa'i, 2016). Maka dari itu setiap ULP di Sumatera Utara perlu membuat program yang dapat meningkatkan religiusitas pegawai seperti kajian rutin setiap jum'at dengan mengundang tokoh agama tertentu, mengadakan kegiatan agama dan lain sebagainya. Program-program tersebut perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan pemahaman pegawai mengenai nilai-nilai religiusitas dalam bekerja.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud

Hermiyetti (2010) mengemukakan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, yang bertujuan untuk memberikan jaminan yang cukup bagi terwujudnya tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan. Mematuhi hukum dan peraturan.

Pelaksanaan kontrol internal yang tepat dapat mencegah penipuan. Jadi sistem pengendalian yang baik pada akhirnya dapat menutup sesorang akan melakukan kecurangan dalam hal ini adalah kecurangan dalam penyediaan barang maupun jasa.

Dalam konsep *fraud triangle theory* kecurangan dalam penyediaan barang maupun jasa disebabkan karena adanya, peluang (*opportunity*), tekanan (*pressure*) dan rasionalisasi, dengan demikian sistem pengendalian internal dalam penyediaan barang maupun jasa dapat mencegah terjadinya kecurangan. Peluang, tekanan, rasionalisasi dapat hilang jika organisasi menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik. Meskipun dalam sistem pengendalian internal masih ada potensi untuk terjadinya kolusi, namun hasil penelitian membuktikan bahwa aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh ULP Provinsi Sumatera Utara sudah baik. Pimpinan melakukan pengawasan secara ketat dalam proses pengadaan barang dan jasa, seperti petugas tidak diperkenankan melakukan pertemuan dengan calon vendor dengan alasan apapun, pimpinan juga melakukan pengawasan terhadap calon vendor yang terindikasi memiliki hubungan kekerabatan dengan panitia pengadaan barang dan jasa.

Hasil penelitian ini membuktikan jika ada pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal dengan pencegahan *fraud*. Hasil penelitian mendukung hasil-hasil penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Mufidah (2017), Hermiyetti (2010) Joseph et al (2015), Rozmita et al (2015) yang juga membuktikan jika pengendalian internal berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan faktor utama untuk dapat mendeteksi dan mencegah jika adanya aktivitas penyimpangan yang akan berakibat pada kerugian pemerintah. Adapun untuk membangun sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien di ULP Provinsi Sumatera Utara harus ada komitmen dari semua pegawai dari tataran manajemen maupun pegawai biasa seperti penyampain informasi yang memadai. Hal ini dikarenakan tanpa adanya komitmen dari semua pihak sistem pengendalian internal tidak akan berjalan dengan baik.

Guna mewujudkan komitmen dalam menerapkan sistem pengendalian internal tersebut, pemerintah daerah perlu untuk memberikan sanksi tegas bagi para top manajemen ULP yang tidak melakukan sistem pengendalian internal. Selain sanksi reward juga perlu diberikan bagi mereka yang telah menjalankan sistem pengendalian internal dengan baik (Faisol, Tarjo, & Musyarofah, 2014). Selain menggunakan sanksi dan reward untuk menjamin pelaksanaan dari sistem pengendalian internal, cara lain yang dapat digunakan adalah pelaksanaan sidak secara konsisten. Hal ini perlu dilakukan agar proses pengadaan barang dan jasa di ULP semakin baik dan juga terbebas dari kecurangan.

SIMPULAN

E-procurement merupakan variabel yang berdampak positif terhadap pencegahan terjadinya kecurangan. Dari hasil ini maka pemerintah dalam hal ini ULP dapat memanfaatkan sistem *E-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa karena dapat mencegah terjadinya kecurangan. Selain dapat mencegah kecurangan, penerapan *E-procurement* menurut Urumsah et al., (2017) juga akan diperoleh 6 keuntungan yaitu 1) meningkatkan komunikasi, 2) memperlancar hubungan dengan pihak supplier, 3) mengurangi biaya transaksi, 4) mengurangi waktu, 5) menyediakan laporan evaluasi dan 6) meningkatkan kepuasan pengguna. Sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dapat dicegah dengan tepat, karena pengendalian internal dapat membuat proses operasional menjadi efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang dapat

diandalkan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian membuktikan jika sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pencegahan *fraud*. Dari hasil ini maka pemerintah dalam hal ini ULP selain pemanfaatan *E-procurement* juga diperlukan sistem pengendalian internal yang baik, sehingga celah untuk melakukan *fraud* dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat ditutupi. Hermiyetti (2010) menyatakan jika pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal yang dilakukan dengan baik dapat mencegah tindakan kecurangan. Jadi sistem pengendalian yang baik pada akhirnya dapat menutup seseorang akan melakukan kecurangan dalam hal ini adalah kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian membuktikan bahwa religiusitas pegawai memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Dengan demikian upaya yang dapat dilakukan ULP dalam upaya melakukan pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kajian-kajian rohani para pegawainya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Hal ini diperlukan agar setiap pegawai memiliki religiusitas yang baik, sehingga keinginannya untuk melakukan kecurangan dapat berkurang. Ahyadi (2015) menjelaskan bahwa religiusitas adalah bagaimana seseorang individu memahami, menginternalkan dan mengintegrasikan norma-norma agama ke dalam diri mereka dan menjadi kepribadian mereka. Religiusitas atau agama dipercaya dapat mengontrol perilaku seseorang dalam melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakininya. Seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari perilaku untuk melakukan kecurangan.

Implications of the study

Dari hasil ini maka pemerintah dalam hal ini ULP dapat memanfaatkan sistem *E-procurement* sedang dalam proses pembelian barang dan jasa karena dapat mencegah terjadinya penipuan. Selain pemanfaatan *E-procurement* juga diperlukan sistem pengendalian internal yang baik, sehingga celah untuk melakukan *fraud* dalam proses penyediaan barang maupun jasa dapat ditutupi. Hasil penelitian membuktikan bahwa religiusitas pegawai memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, dengan demikian upaya yang dapat dilakukan ULP dalam upaya melakukan pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kajian-kajian rohani para pegawainya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Hal ini diperlukan agar setiap pegawai memiliki religiusitas yang baik, sehingga keinginannya untuk melakukan kecurangan dapat berkurang.

Limitations and future research indications

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang di analisis hanya *E-procurement*, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, etika pegawai dan religiusitas pegawai sebagai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*. Padahal masih ada variabel lain lain yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* seperti komitmen organisasi, motivasi kerja dan peran kepemimpinan.

Adapun saran yang penyusun tawarkan diataranya adalah terkait dengan pencegahan *fraud* yang perlu diperhatikan adalah penggunaan dokumen. Hal ini

dikarenakan pernyataan akan menolak untuk menggunakan dokumen fotokopian mendapatkan skor yang paling kecil. Saran lainnya adalah berkaitan dengan etika pegawai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pimpinan ULP di Seluruh Provinsi Sumatera Utara adalah pegawai tidak menerima dan memberi imbalan dan selalu menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik.

Kedua hal ini perlu mendapat perhatian lebih karena mendapatkan skor yang paling rendah diantara komponen lainnya. Sementara itu berkaitan dengan budaya organisasi ULP Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan perubahan dalam mekanisme kerja, untuk memudahkan pegawai dengan mencegah terjadinya *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M. R. K., Ardiyani, K., & Ardianingsih, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 10, 1-10.
- Agyemang, J. K. (2016). Internal Control and Fraud Prevention. *International Journal of Management and Scientific*, 3(1), 2-12.
- Ahyadi, A. (2015). *Psikologi agama: kepribadian muslim Pancasila*. Ba: Sinar Baru. Retrieved from https://scholar.google.com/scholar?q=muslim+psikologi&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5#0
- Atrizka, D., Lubis, H., Simanjuntak, C. W., & Pratama, I. (2020). Ensuring Better Affective Commitment and Organizational Citizenship Behavior through Talent Management and Psychological Contract Fulfillment: An Empirical Study of Indonesia Pharmaceutical Sector. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(1), 545-553.
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh dimensi budaya dan religiusitas terhadap kecurangan pajak.
- Chawla, D., & Joshi, H. (2018). Consumer attitude and intention to adopt mobile wallet in India – An empirical study. *International Journal of Bank Marketing*, 37(7), 1590-1618.
- Croom, S., & Brandon-jones, A. (2007). Impact of e- procurement: Experiences from implementation in the UK public sector. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 13(4), 294-303.
- Danilwan, Y., Dirhamsyah., Pratama, I. (2020). The Impact of Consumer Ethnocentrism, Animosity And Product Judgment On The Willingness To Buy. *Polish Journal of Management Studies* 2020; 22 (2): 65-81.
- Farida, N. (2013). Kinerja unit layanan pengadaan barang / jasa di sekretariat daerah kabupaten banjar. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, II(1), 143-163.
- Ghani, R. (2017). Ini Celah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa yang Berpotensi Korupsi. Retrieved from <https://eproc.lkpp.go.id/forum/home/threads?post=1&threadId=444>.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2012). *Partial Least Square, Konsep Teknik, dan Aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermiyetti. (2010). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 4(2), 1-14.
- Isnaini, D. B. Y., Nurhaida, T., & Pratama, I. (2020). Moderating Effect of Supply Chain Dynamic Capabilities on the Relationship of Sustainable Supply Chain Management Practices and Organizational Sustainable Performance: A Study on the Restaurant Industry in Indonesia. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(1), 97-105.
- James, S., & Omulo, E. O. (2018). Agent Based Fraud Detection And Reporting In Public E-Procurement. *International Journal of Current Research*, 10(11), 75077-75081.
- Joseph, O. N., Albert, O., & Byaruhanga, J. (2015). Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County. *International Journal of Business and Management Invention*, 4(1), 47-57.
- Marbun, D. S., Effendi, S., Lubis, H. Z., & Pratama, I. (2020). Role of Education Management to Expediate Supply Chain Management: A Case of Indonesian Higher Educational Institutions. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(1), 89-96.
- Nedialita, A. (2014). Kinerja Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), 12-22.

- Njenga, N. M., & Osiemo. (2013). Effect of fraud risk management on organization performance: A case of deposit-taking microfinance institutions in Kenya. *International Journal of Social Sciences and Entrepreneurship*, 1(7), 490–507.
- Nu'man, A. H., Nurwandi, L., Bachtar, I., Aspiranti, T., Pratama, I. (2020). Social Networking, and firm performance: Mediating role of comparative advantage and sustainable supply chain. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(3), 664-673.
- Nugroho, R. S., Wanto, A. H., & Trisnawati. (2015). Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada SKPD Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1905–1911.
- Nugroho, A., Christiananta, B., Wulani, F., Pratama, I. (2020). Exploring the Association Among Just in Time, Total Quality and Supply Chain Management Influence on Firm Performance: Evidence from Indonesia. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(2), 920-928.
- Oduro, I. M., & Cromwell, A. S. (2018). Internal Control and Fraud Prevention in the Ghanaian Local Government Service. *European Journal of Business and Management*, 10(14), 46–58.
- Pratama, I., Che-Adam, N., Kamardin, N. (2019). *Corporate social responsibility disclosure (CSR) quality in Indonesian public listed companies*. Polish Journal of Management Studies, 20 (1), 359-371.
- Purnamasari, P., & Amaliah, I. (2015). Fraud Prevention: Relevance to Religiosity and Spirituality in the Workplace. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(2), 827–835. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.109>
- Robbins, R., Glock, C. Y., & Stark, R. (1994). *Religion and Society in Tension. Sociological Analysis* (Vol. 27). <https://doi.org/10.2307/3710391>
- Rotchanakitumnuai, S. (2013). The governance evidence of e-government procurement. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 7(3), 309–321. <https://doi.org/10.1108/TG-01-2013-0004>
- Rozmita, D., Yuniarti, R., & Jabbaar, M. (2015). Pengaruh Pelaksanaan Risk Based Internal Auditing Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 3(3), 831–836. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17509/jrak.v3i3.6623>
- Saragih, J., Tarigan, A., Silalahi, E. F., Wardati, J., Pratama, I. (2020). Supply chain operational capability and supply chain operational performance: Does the supply chain management and supply chain integration matters. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(4), 1222-1229.
- Saragih, J., Tarigan, A., Pratama, I., Wardati, J., Silalahi, E. F. (2020). The Impact of Total Quality Management, Supply Chain Management Practices and Operations Capability on Firm Performance. Polish Journal of Management Studies, 21 (2), 384-397.
- Setyadiharja, R. (2018). *E-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)*. Yogyakarta: Deepublis.
- Sujianto, Yuliani, F., Syofian, Saputra, T, Pratama, I. (2020). The Impact of The Organizational Innovativeness On The Performance Of Indonesian Smes. Polish Journal of Management Studies 2020; 22 (1): 513-530
- Sukmadinata, N. S. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Universitas Stuttgart. Jakarta: Salemba Empat.
- Urumsah, D., Valoni, N., & Asmu'i, F. (2017). *Pencegahan Fraud dengan E-Procurement*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Utami, C. W., Sumaji, Y. M. P., Susanto, H., Septina, F., & Pratama, I. (2019). Effect of Supply Chain Management Practices on Financial and Economic Sustainable Performance of Indonesian SMEs. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 8(1), 523-535.
- Wicaksono, A. P., & Urumsah, D. (2016). Factors Influencing Employees To Commit Fraud in Workplace Empirical Study in Indonesian Hospitals. *Asia Pacific Fraud Journal*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.01.01>